

IMPLIKASI PERTARUNGAN IDEOLOGI TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA

Afriantoni

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah

Jl. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 1 km. 3,5 Palembang

Abstract:

The battles of ideology after Indonesia's independence has implied indirectly toward the development of national education which was established by the Indonesian nation. Battles and debates of the concept of Indonesian education system has been becoming public consumptions that never ends. The implication is the double educational system which happens in Indonesia nowadays, and those are the real forms of ideology battles. Consequently the battles linearly impact on the institution dichotomy, educational objective, scientific and curriculum in every Indonesian educational unit.

Keywords: *implications, ideology, double systems*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, ditandai dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Teks tersebut dibacakan di Jln. Pegangsaan Timur pada jam 10.00 pagi dan merupakan hasil perundingan sekelompok mahasiswa, Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh nasional lainnya (Sirozi, 2004:40). Tonggak sejarah ini diraih tanpa meminta belas kasihan pemerintah Jepang maupun Belanda (Hasbullah, 1999:47-70). Kemerdekaan bangsa Indonesia ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri karena ternyata korban harta, nyawa, jiwa, raga, dan pikiran tidak sia-

sia, perjuangan panjang bangsa Indonesia membuahkan hasil. Bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan dan kini dapat menikmati indahnyanya kehidupan yang bebas dari tekanan para kolonialis.

Sebagai bangsa yang baru, Indonesia, tentu sulit untuk membangun sebuah Negara yang "direbut" dari para kolonialis karena para kolonialis tidak akan peduli dengan perkembangan bangsa bekas jajahannya. Untuk itu, konsekuensi dari kemerdekaan adalah memanfaatkan kemerdekaan secara arif dan bijaksana dalam proses pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan. Artinya bahwa tema pokok bagi bangsa Indonesia yang baru lahir dari "rahim sejarah" adalah *"mengisi kemerdekaan dengan pembangunan"*. Kelahiran bangsa Indonesia menyebabkan denyut nadi pembangunan segera dimulai di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Proses pendidikan menyatu kental dalam proses pembangunan dan mengalir ibarat aliran sungai yang jernih untuk membawa ke muara yang tenang dan damai. Karena itu, kesinambungan pendidikan sangat urgen dibicarakan terutama kaitannya dengan peningkatan mutu SDM dan kualitas generasi muda di masa depan.

Selain itu, harus diakui para kolonialis terutama Belanda telah meninggalkan "Pekerjaan Rumah" yang sangat berat tentang sistem pendidikan nasional. Pekerjaan Rumah yang dimaksudkan adalah kegagalan kelompok nasionalis-agama dan nasionalis-sekuler. Di satu sisi, nasionalis-sekuler tanpa pertimbangan kritis meniru model Sistem Eropa Sekuler untuk sistem pendidikan nasional dan hanya melengkapi kurikulumnya dengan nilai-nilai nasionalistik. Sementara, kelompok nasionalis-agama hanya memikirkan model

pendidikan agama Islam yang mempertahankan pendidikan nasional yang beragama (Sirozi, 2004:39).

Dalam konteks inilah, maka politik pendidikan menjadi penting untuk melihat secara komprehensif akar sejarah dikotomi pendidikan yang tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa pada masa awal kemerdekaan, sehingga berimplikasi secara nyata terhadap pendidikan seperti saat ini. Sebagai bangsa yang berdaulat, maka “bayi Indonesia” harus secepatnya mengubah sistem pendidikan dan menyesuakannya dengan keadaan baru dan pola pembangunan yang baru. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem pendidikan nasional yang berdasarkan eksistensi masa lampau, masa kini, dan kewaspadaan terhadap perkembangan masa depan (Asrohah, 2001:177).

Dari berbagai pemikiran di atas dicoba dikaji beberapa permasalahan antara lain bagaimana pertarungan ideologi pendidikan awal kemerdekaan Indonesia? bagaimana terjadi sistem ganda dalam pendidikan nasional? dan apa implikasi pertarungan ideologi tersebut? Ketiga pertanyaan tersebut, pada hakekatnya berpusat pada satu pertanyaan inti yakni apa dan bagaimana implikasi pertarungan ideologi awal kemerdekaan terhadap pendidikan di Indonesia? Berangkat dari kerangka pertanyaan tersebut, tulisan ini mencoba menguraikan kajian historis tentang implikasi pertarungan ideologi tersebut terhadap pendidikan nasional yang menganut sistem ganda dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

B. Pertarungan Ideologi Akar Masalah Pendidikan

Persoalan ideologi Negara selalu berkaitan dengan pendidikan karena ideologi diajarkan melalui pendidikan baik

secara formal maupun nonformal. Secara terminologi ideologi yakni *“keyakinan dan gagasan tentang kehidupan manusia yang harus ditaati seluruh komponen masyarakat negara-bangsa”* (Munawwir, 1986:33). Dalam kajian ini, maka pertanyaannya adalah *“ideologi apa yang hendak dibangun oleh bangsa Indonesia ini?”* Membangun pendidikan sama artinya membangun negara dan membangun ideologi pendidikan sama artinya membangun ideologi negara. Persoalan ini sangat urgen karena pada awal kemerdekaan sangat rentan muncul *“perdebatan atau pertarungan tentang ideologi negara”*(Boland, 1986:33).

Perdebatan atau pertarungan ideologi negara ini berimplikasi mekanisme politis terhadap pendidikan dalam kerangka pembentukan karakter filosofis pendidikan nasional yang akan dibangun dan dikembangkan. Jelas sekali pertarungan ideologi awal kemerdekaan sangat signifikan pengaruhnya dalam memilih pola pendidikan bagi bangsa Indonesia yang baru membangun dan meletakkan dasar-dasar penting dalam sistem kenegaraan dan sistem pendidikan itu sendiri. Secara historis untuk melihat ini, maka perlu dipelajari secara mendalam tentang pertarungan kesepakatan Piagam Jakarta, kesepakatan pokok-pokok pendidikan nasional dan *“kompromi jalan tengah”* sistem pendidikan nasional.

1. Pertarungan Piagam Jakarta

Pertarungan tentang Piagam Jakarta terjadi tidak terlepas dari persoalan paham keagamaan dan pemerintah baru yang harus mengambil sikap tentang bentuk negara baru yang bernama Indonesia. Pertarungan ini terhitung *“sangat singkat”* pasca proklamasi, bangsa Indonesia harus segera memiliki *“konstitusi negara”* untuk mendukungnya sebagai bangsa yang berdaulat di dunia internasional.

Pada awalnya menurut B.J. Boland perdebatan ini dimulai dari setelah disetujui dan ditandatanganinya Piagam Jakarta oleh sembilan tokoh yakni Soekarno dan Muhammad Hatta (Nasionalis-sekuler), Maramis (Protestan), Abikusno Tjokrosujoso (Mantan Ketua Partai Syariat Islam Indoensia), Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim (*Grand Old Man* dari Sarekat Islam), Achmad Subarjo (Mantan Menteri Luar Negeri dari Masyumi), Wahid Hasyim (wakil Islam terkemuka bagian akhir masa penjajahan Jepang), dan M. Yamin (Nasionalis-sekuler). Tokoh tersebut semuanya awalnya, sangat cerdas memasukkan nilai Islam ke dalam sistem kenegaraan Indonesia melalui Piagam Jakarta. Kalimat yang paling penting dalam Piagam Jakarta adalah ketentuan bahwa Negara didasarkan kepada ketuhanan *“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”*. Kemudian kata-kata ini disebut *“tujuh kata”* yang menjadi *“simbol penyesalan”* umat Islam dan kekecewaan terhadap Soekarno yang menggiring kompromi dengan tokoh Islam agar menyepakati dibuangnya *“tujuh kata”* tersebut.

Pada waktu itu, kalangan Protestan Latuharhary menyatakan keberatan terhadap perkataan *“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”* dalam Piagam Jakarta, alasannya akan berakibat besar dan fatal bagi agama lain selain Islam, serta dapat menimbulkan kesulitan sehubungan dengan adat-istiadat. Maka, pada rapat panitia 62 tanggal 11 Juli 1945, kesepakatan yang sudah dirancang terpaksa harus *“kandas”* karena alasan toleransi antar umat beragama dan memahami perbedaan adat istiadat. Setelah melalui perdebatan yang panjang disimpulkan bahwa *“tujuh kata”* tersebut dianggap meresahkan dan akhirnya diambil

jalan “kompromi politik”, maka “tujuh kata” diganti “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Boland, 1985:39).

2. Pertarungan Pokok-Pokok Pendidikan Nasional

Di samping pertarungan ideologis sebagaimana di atas, dalam sejarah pendidikan nasional, juga sempat terjadi pertarungan mengenai pokok-pokok pendidikan nasional, sebagai sistem pendidikan nasional. Jika dilihat dari sejarahnya, menjelang Indonesia merdeka, diskusi tentang bagaimana wujud sistem pendidikan nasional Indonesia benar-benar dijadikan acuan oleh perancang negara dan pemikir politik “bayi Indonesia” pada waktu itu.

Dalam pertarungan itu, Oshikawa dapat melihat bahwa pembentukan sistem pendidikan nasional yang akan dibentuk memiliki corak tersendiri yang dibagi menjadi tiga kelompok, yakni nasionalis-sekuler, humanis-sosialis-sekuler, dan humanis-relegius. Sejalan dengan pendapat Oshikawa ini, Abudin Nata secara sederhana menyatakan bahwa pertarungan penentuan sistem pendidikan nasional ini dipengaruhi pertarungan ideologi negara yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni nasionalis, sekuler komunis, dan islamis.

Pertama, kelompok nasionalis, tokohnya adalah Tan Malaka, memperlihatkan cara berpikir dialetika kritis (*madilog*) dan melihat “ilmu” yang beredar pada massa rakyat pada waktu itu sebagai kekuatan kelas rakyat, seperti ungkapannya “...kekurangan pandangan dunia (*weltanschauung*), kekurangan filsafat. Mereka masih tebal diselimuti ilmu bakat dan takhayul bercampur aduk. Mereka tiada sadar atas kekuatan kelasnya...” (Oshikawa, 2000). Pandangan nasionalis ini, menurut Tan Malaka harus dapat direfleksikan dan tercermin dalam sistem pendidikan nasional.

Secara kelembagaan kelompok nasionalis telah memperlihatkan dasar ideologi membangun pendidikan dengan berdirinya Taman Siswa yang tokohnya Ki Hajar Dewantara yang kemudian dikenal sebagai pahlawan bidang pendidikan. Padangan kelompok ini, agama semata-mata aspek budaya dimana model pendidikan yang diperkenalkan adalah model pendidikan asli sebagai metode yang perlu diperhatikan seperti pesantren dengan sistem among yang perlu diadopsi untuk menyelenggarakan pendidikan umum dan kebudayaan Indonesia. Namun demikian, isi pendidikan (pengetahuan) Barat perlu diambil untuk mewujudkan wawasan dan keterampilan Putra Pribumi (Oshikawa, 2000).

Kedua, kelompok sekuler-komunis, kelompok ini telah memperlihatkan supermasi filsafat dan sains di atas agama. Sekularisme adalah 'akidah' dari ideologi kapitalisme. Ideologi ini, sebagaimana ideologi lainnya memiliki peraturan kehidupan. Sebagai sebuah ideologi, kapitalisme mempunyai ide dasar dan ide-ide cabang yang dibangun di atas akidah tersebut. Akidah yang dimaksudkan dalam hal ini dipahami sebagai pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta tentang apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta hubungan kehidupan dunia dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia (Bahrul Ulum, 2007).

Di atas dasar sekularisme ini dibangunlah berbagai ide cabang dalam ideologi kapitalisme, seperti demokrasi dan liberalisme (kebebasan). Ketika agama sudah dipisahkan dari kehidupan, berarti agama dianggap tidak memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan. Jika demikian, maka manusia itu sendirilah yang mengatur kehidupannya. Sehingga mereka

menganggap dirinya paling benar hingga rela menyingkirkan aturan Allah dalam kehidupan ini.

Ketika agama dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dengan pengaturan kehidupan, terutama bidang pendidikan, maka agama tidak lagi berperan sebagai pengendali motivasi manusia (*driving integrating motive*) atau faktor pendorong (*unifying factor*). Kepribadian peserta didik mengalami keguncangan citra diri (*disturbance of self image*) dan kepribadian yang pecah (*split personality*) sehingga tidak memiliki kepribadian yang islami (*Asy Syakhshiyah Al Islamiyyah*).

Ketiga, kelompok islamis, kecondongan kelompok ini pada pandangan hidup Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadis dengan aturan normative Islam pada tataran pendekatan yang bersifat aksiomatik dan menawarkan prinsip dasar nilai-nilai keislaman. Para tokoh muslim modernis pada umumnya melihat bahwa Islam sekaligus mempunyai dua sisi ilmu yakni ilmu naql yang diwahyukan dan ilmu aql yang berkembang berdasarkan intuisi, rasio dan empiris. Selain itu, Soekarno seorang nasionalis-agamis pada 1939 memandang adanya "science Islam" yakni ajaran Islam yang rasional sehingga pelaksanaan pendidikan Islam secara utuh dengan cara menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum (Oshikawa, 2000).

Secara kelembagaan kelompok islamis ini diperkuat setelah secara terus menerus mendapat saingan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda sebelum kemerdekaan yang membawa misi atau zending dan mendapat inspirasi dari perkembangan Islam puritan di Sumatera Barat. Zainuddin Labai Al Yunusi mendirikan perguruan yang telah mentransformasi dirinya menjadi lembaga pendidikan Islam

modern. Lembaga tersebut bersimpul pada sebuah organisasi Muhammadiyah yang menggunakan sistem kelas yang diambil dari model persekolahan kolonial, di samping mengajarkan Geografi, Al Jabar, Bahasa, dan Sejarah Islam. Pergerakan modernisasi ini sampai ke ujung Sumatera yakni Aceh yang ditandai berdirinya Perguruan Darussalam juga diinspirasi oleh Muhammadiyah yang menggabungkan pendidikan sekolah dan madrasah (Tomagola, 1985:61).

Selain itu, kondisi yang serupa terjadi di wilayah Jawa Tengah yang telah mentransformasi dirinya menjadi lembaga pendidikan Islam modern. Lembaga tersebut bersimpul pada sebuah organisasi Muhammadiyah dan Persis yang mempunyai sikap bahwa Islam tidak mengenal dualisme ilmu (ilmu umum dan ilmu agama) (Lihat Buku Pedoman Guru-guru Muhammadiyah). Demikian pula, pada tanggal 20 September 1926 bertepatan dengan 12 Rabi'ul Awwal 1345, di dalam peringatan Maulid Nabi, di hadapan masyarakat yang hadir pada kesempatan itu, dideklarasikan pembukaan kembali Pondok Gontor. Imam Zarkaysi dengan pesantren Gontornya terinspirasi pola pembelajaran di Sumatera Barat maka Imam Zarkasyi secara aktif melakukan modernisasi kurikulum pesantren Gontor sehingga mampu besar dan mendapat prediket pesantren modern (www.gontor.ac.id). Demikian pula pada tahun 1930, Wahid Hasyim dengan madrasah Nizamiyahnya juga bermaksud memasukkan pelajaran umum ke dalam pesantren Tebuireng untuk menciptakan kiyai intelek dan mengangkat derajat umat (Tomagola, 1985:61).

Dari pertarungan ketiga kelompok tersebut, Soekarno secara sengaja banyak mendorong kelompok Islam untuk terus maju, asalkan melalui pendekatan rasionalitas. Padahal, Soekarno pada 1939 mendorong pendidikan pesantren yang

didirikan oleh Ahmad Hasan untuk memasukkan sebanyak-banyaknya pengetahuan umum ke dalam pesantren (Oshikawa, 2000). Awalnya, dorongan pra kemerdekaan memang murni, namun secara faktual, pasca kemerdekaan dorongan itu hanya bersifat motivatif atau teori semata-mata, maka ditempuhlah jalan tengah yakni "sistem ganda". Karena dalam dinamika politik nasional awal kemerdekaan ditempuh jalan "kompromis" sebagai solusi terakhir dari berbagai perdebatan "agama dan politik" di tengah masyarakat Indonesia yang pluralis tersebut.

3. "Kompromi Jalan Tengah" Sistem Pendidikan Nasional

Pertarungan ideologi negara dan pokok-pokok pendidikan nasional di atas telah melahirkan "Kompromi Jalan Tengah" yang bersifat melemahkan umat Islam untuk berkiprah lebih luas dan leluasa di Indonesia Baru. Semua kompromi tersebut, termuat dengan jelas pada hukum dasar Negara UUD 1945, yakni pasal 29 tentang agama, pasal 31 tentang kebudayaan, dan pasal 32 tentang pendidikan nasional. UUD 1945 sendiri pada hakekatnya dihasilkan berdasarkan "kompromi politik", khususnya tentang agama dan pendidikan. Pada waktu itu, setiap kelompok kepentingan bertarungan dan bergulat dalam mekanisme politis untuk memperjuangkan ideologi mereka masing-masing yang menampung aspirasi konstituen atau kelompoknya, maka akhirnya Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara adalah "jalan tengah" untuk menenggarai pertarungan tersebut.

Kendati pun demikian, segera setelah kemerdekaan, dalam bidang pendidikan di bawah kepemimpinan Soekarno masih secara besar-besaran mengadopsi kebijakan kolonial dengan mengambil model persekolahan yang sudah lama

diterapkan oleh Belanda. Pada waktu itu, lembaga pendidikan yang berbasiskan ideologis dan agama "dikucilkan" karena tidak sesuai dengan semangat pembangunan nasional yang mengarah kepada rakyat dan "nasionalisme semu". Kalau pun ada perhatian, hanyalah sebatas dorongan moral dan emosional, tanpa diikuti kebijakan konkret yang berpihak kepada lembaga yang berbasis ideologi dan agama. Dorongan tersebut dapat diamati secara tertulis antara lain:

- 1) Maklumat BP-KNIP sebagai contoh akurat ketidakberpihakan pemerintah pada tanggal 22 Desember 1945 Nomor 15 Berita RI Tahun II Nomor 4 dan 5 halaman 20 kolom 1, yakni *"agama pendidikan di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan diperpesat"*.
- 2) Keputusan BP-KNIP tanggal 27 Desember 1945 yang berbunyi *"agar madrasah mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah"*.
- 3) Laporan Panitia Penyelidik Pengajar RI tanggal 2 Mei 1946 yang diketuai Ki Hajar Dewantara dengan 51 anggota yakni *"pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah dipandang perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberi bantuan berupa biaya sesuai dengan keputusan BP-KNIP"*
- 4) Pidato Ki Hajar Dewantara di alun-alun Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1946 menyatakan bahwa *"Pondok Pesantren adalah sistem pendidikan yang paling baik dan telah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dari sejak awal perkembangannya"*.
- 5) Manuver Wahid Hasyim pada tahun 1955 sebagai Menteri Agama dengan dukungan kelompok Islam modernis, melanjutkan manuver guna merealisasikan non dualisme dalam pendidikan. Ia ingin melaksanakan program pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan

umum di sekolah agama. Pada tahun 1930-an sempat mengalami kegagalan di beberapa pesantren di Jombang dan Tebuireng karena ditentang oleh kelompok tradisionalis.

- 6) Pidato Ketua Umum Partai Masyumi Muhammad Natsir di depan Konstituante tentang penolakannya terhadap dualisme pendidikan yang dilakukan pemerintah merupakan bukti bahwa pergolakan untuk memperebutkan sistem pendidikan nasional yang masih berlangsung.
- 7) Pada Orde Baru pertentangan pemikiran pendidikan itu mungkin agak terabaikan karena mereka terlibat konflik politik yang lebih terbuka. Pada masa Soekarno dan Orde Baru, beberapa kompromi politik justru lebih menonjol ketimbang identitas ideologis, seperti dibentuknya Departemen Agama yang memfasilitasi pendidikan agama di samping Departemen Pendidikan dan Pengajaran yang menyelenggarakan terutama pendidikan umum. Tentu saja, sistem seperti ini dilihat oleh kelompok Muslim Modernis sebagai pelembagaan dualisme pendidikan, sementara varian-varian pendidikan lain yang bersifat lokal seperti pesantren, madrasah, dan sebagainya dimarginalkan atau paling tidak mendapatkan persaingan sekolah-sekolah pemerintah yang hadir sampai di pedesaan (Oshikawa, 2000).

Berangkat dari fenomena aktual dan maklumat dari ragam dokumen dan pernyataan di atas, pada dasarnya sebagai *stakeholder* pemerintah telah jelas mencantumkan keberpihakan terhadap pembangunan umat Islam, namun secara implementasi pemerintah lebih memilih menerapkan pola pendidikan yang sudah bertahun-tahun dijalankan oleh

Belanda. Inilah awal “keruwetan” dalam pendidikan nasional kita yang berakhir dengan jalan kompromi dengan cara menerapkan kedua-duanya dan berada dalam kementerian yang berbeda-beda. “Kompromi Jalan Tengah” inilah yang kemudian hari melahirkan “sistem pendidikan ganda” dengan melahirkan “dikotomi kelembagaan” dan “dikotomi keilmuan”.

Pernyataan menarik untuk menggambarkan “keruwetan” ini ditulis oleh Sirozi dalam mengungkapkan pertarungan ideologi pendidikan yang dianggapnya sebagai kegagalan Soekarno yakni:

Dalam lingkup pendidikan, tantangan terberat yang dihadapi pemerintah yang baru ini adalah menyelesaikan konflik sekuler-agama sebagai ciri sistem pendidikan nasional. Berbeda dengan negara baru pasca kolonial lain, yang pemerintahannya berhasil mensekulerkan sistem pendidikan nasionalnya, pemerintah Soekarno gagal dalam hal ini. Sekolah agama yang dikelola oleh beberapa organisasi keagamaan, termasuk Muslim, terus berkembang. Dalam lingkup politik, pemimpin nasionalis-agama, terutama yang tradisional dan modernis, bersikeras bahwa negara harus menganut model beragama untuk Sistem Pendidikan Nasionalnya (Sirozi, 2004).

Pemikiran di atas, setidaknya menjelaskan bahwa Soekarno gagal dalam memformat pendidikan Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan penting didukung oleh umat Islam. Wajah politik negara dan pendidikan Indonesia adalah “kompromi” yang tidak menguntungkan kepentingan umat Islam.

Menurut Abudin Nata cita-cita politik pendidikan kita awalnya sudah baik pasca kemerdekaan yang lebih diarahkan pada upaya memperbaharui dan memperbanyak lembaga Islam yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Namun, karena situasi konflik di awal kemerdekaan belum selesai, dengan munculnya berbagai macam pemberontakan, maka idealisasi pendidikan nasional belum maksimal. Situasi inilah yang akhirnya menyuburkan “sistem ganda” pendidikan Indonesia dan ditambah lagi dibiarkannya sistem pendidikan nasional berjalan apa adanya di tengah perubahan sistem kenegaraan kita.

C. Kebijakan Pendidikan Indonesia: Sistem Ganda

Pertarungan ideologi telah berimplikasi kepada “sistem ganda” pada pendidikan nasional, bisa disebut “pendidikan umum dan pendidikan Islam”. Secara historis, kebijakan pendidikan ganda mengungkapkan persoalan-persoalan dibalik sistem pendidikan nasional secara objektif.

Kelahiran Departemen Agama RI—sekarang Kementerian Agama RI yang konon satu-satunya di dunia— pada 3 Januari 1946 membawa angin segar untuk menata kehidupan umat beragama di Indonesia terutama dalam penataan eksistensi pendidikan Islam. (Fuad dan Jamhari, 2002:61). Di tengah-tengah kesulitan mengatur negeri, justru peran Departemen Agama diperkuat agar kebijakan tentang pendidikan Islam lebih terarah. Tapi justru dengan pola ini, pendidikan Islam terjebak pada kristalisasi sistem ganda pendidikan di Indonesia. Secara gamblang Sirozi menulis:

Akhirnya, kesulitan untuk sebagian dan sementara waktu terselesaikan dengan penerapan sistem ganda. Ini berarti bahwa model pendidikan sekuler yang dianut

oleh para pemimpin nasionalis sekuler didampingi oleh model pendidikan agamawi yang dituntut oleh para pemimpin muslim. Kelak, model yang pertama ini dikenal sebagai pendidikan “umum” yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan yang kedua dikenal sebagai pendidikan “agamawi” dikelola Departemen Keagamaan (Depag) (Sirozi, 2004).

Kutipan di atas, mengisyaratkan bahwa secara historis para pemimpin Muslim terlibat secara aktif adanya sistem pendidikan ganda yang kemudian dinamakan pendidikan umum dan pendidikan agama yang dikelola oleh dua departemen yang berbeda yakni Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem ini berimplikasi dalam hal keilmuan dan pengaturan kurikulum pendidikan. Terkait dengan persoalan ini, ada dua point penting dibicarakan pada pembahasan sistem ganda pendidikan yakni problematika keberadaan Depag RI dan problematika kebijakan pendidikan.

1. Problematika Keberadaan Depag RI

Berdirinya Depag RI memang menguntungkan umat Islam karena banyak kesempatan dalam menentukan arah pengembangan pendidikan Islam. Namun ada beberapa hal penting disimak dengan berdirinya Depag ini yakni kesulitan Depag meletakkan dasar ideologi negara sebagai landasan kehidupan beragama dan bernegara dalam dunia pendidikan Islam. Persoalan ini disebabkan, karena secara ideologis bangsa Indonesia bukan negara agama, tetapi bukan negara sekuler. Bukti akurat yang dapat dijadikan logika ini adalah Surat Keputusan Pembentukan Depag dicantumkan tugas pokoknya,

yaitu: (1) Memberikan pelayanan keagamaan, (2) Mengembangkan pendidikan agama, dan (3) Membina kerukunan antar umat beragama. Maka, aroma dikotomis dalam implementasinya pun sangat terasa dari tugas pokok ini, karena prinsip yang digunakan adalah pemerintah hanya bertugas sebatas mengelola pembinaan kehidupan keagamaan dan pengembangan umat dan tidak berhak mencampuri urusan akidah dan ibadah. Pemerintah justru memandang bahwa akidah dan ibadah merupakan urusan internal masing-masing agama. Meskipun demikian, pemerintah tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting sebagai sumber nilai dalam berlaku (Fuad dan Jamhari, 2002:61).

Karena status sebagai bangsa yang berideologi Pancasila, maka rujukan atas berbagai persoalan pendidikan Islam adalah Pancasila. Pada posisi inilah, secara hakikat pendidikan Islam baik secara kelembagaan maupun dalam pengembangan kurikulum terbelenggu problematika yang mengelilinginya. Walaupun jauh sebelum itu, Depag dengan "otoritas" yang dimilikinya memberikan peluang berkembangnya madrasah-madrasah dari tingkat Raudhatul Anfal, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, sampai Aliyah, baik negeri maupun swasta. Husni Rahim menulis data perkembangan madrasah yakni Raudatul Anfal atau Bustanul Atfal yakni 7.570, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yakni 31.484 dan Madrasah Aliyah 3.269 di seluruh wilayah provinsi seluruh Indonesia. (Husni, 2001:12-13). Semua lembaga pendidikan tersebut, masih beroperasi sampai dengan saat ini. Walau demikian, perjalanan sekian banyak lembaga pendidikan termasuk pesantren akhirnya menyisakan persoalan penting yakni ideologi negara belum usai diperdebatkan yang berimplikasi pada pemahaman dan

persepsi masyarakat secara luas tentang pendidikan yang ganda.

Pasca kemerdekaan yang berdasarkan tuntutan masyarakat mengharuskan pemerintah untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), maka pada tanggal 26 September 1951, KH. Ahmad Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama meresmikan berdirinya PTAI di Yogyakarta dengan 36 mahasiswa pertama (Zamakhsyari, 2000:87-100). Di awal dekade 90-an, lembaga-lembaga pendidikan Islam ini mampu memberikan kontribusi pemikiran positif terhadap permasalahan umat, artinya peran lembaga ini cukup signifikan dalam dunia kemasyarakatan.

2. Problematika Kebijakan Pendidikan

Kebijakan utama dalam pembahasan ini yakni pendirian lembaga pendidikan Islam, sesungguhnya pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diperluas ini adalah kebijakan politis-populis pasca berdirinya Depag pada tahun 1946. Pemerintah mengambil langkah agar agama-agama yang diakui secara resmi harus mengajarkan ajaran agamanya masing-masing dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

Kebijakan tersebut termaktub pada pasal 31 Ayat 2 UUD 1945. Tentu akibat dari amanat ini, pemerintah RI harus menyusun UU tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan pendidikan secara nasional dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan secara nasional (Tadjab, 1994:80-81). Termasuk di dalamnya akan melibatkan dan juga diperhitungkan adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Memang dalam sejarah pendidikan di Indonesia pernah ada UU yang mengatur tentang pendidikan secara nasional, antara lain:

- 1) UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- 2) UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1950;
- 3) UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
- 4) UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.

Semua UU di atas, bukanlah satu sistem pengajaran atau pendidikan nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 31 Ayat 2 UUD 1945, karena UU Tahun 1950 dan 1954 hanyalah menguraikan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah semata-mata, sedangkan UU Tahun 1961 hanya membicarakan tentang cara mendirikan pendidikan tinggi. UU tahun 1965, walaupun sudah mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi bukan realisasi dari kehendak UUD 1945, tetapi masih bersifat konseptual dan berisikan pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional belaka.

Kelambanan dan ketidakseriusan ini terjadi bukan tanpa alasan, alasan pokok dan rasional pada masa tersebut pemerintah Indonesia masih sangat rentan dengan pemberontakan, penyelewangan, dan pelanggaran dalam implementasi UUD 1945, terutama pasca diberlakukannya Manifesto Politik oleh Presiden Soekarno dalam melaksanakan UUD 1945 dengan spesifikasi Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin (Tadjab, 1994:80-81).

Namun nampaknya usaha menyusun UU Sistem Pendidikan Nasional bukanlah hal yang mudah karena ternyata amanat UUD 1945 sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 baru dapat direalisasikan pada tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal dengan

sebutan UUSPN pada tanggal 27 Maret 1989 (Tadjab, 1994:80-81) yang jelas di dalam UUSPN 1989 inilah pengakuan secara nasional terhadap eksistensi pendidikan Islam yang sebelumnya terkesan dimarginalkan dan ditinggalkan bahkan sebageian menganggapnya sebagai lembaga pendidikan yang *out of date* dalam ruang lingkup nasional.

Dari beberapa pemikiran di atas, sungguh sangat luar biasa pertarungan ideologi yang terjadi dalam upaya memperjuangkan bangsa dan pendidikan Indonesia, sehingga sampai kini belum tersolusikan. Bahkan akibat sistem ganda pendidikan Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Naim sebagaimana dikutip oleh Sirozi (2004:41) menyatakan "Siapapun yang mengamati sistem pendidikan Indonesia, kesan pertamanya adalah bahwa sistemnya ruwet, sukar diikuti dan dualistik".

Pernyataan ini benar adanya, dengan bukti-bukti yang telah dipaparkan di atas, sehingga walaupun sudah diterapkannya UUSPN tahun 1989 tetap saja implikasi awal kemerdekaan Indonesia masih dapat dirasakan sampai sekarang. Akibat fatalnya adalah rendahnya kualitas tamatan di hampir setiap lembaga pendidikan di Indonesia yang berakibat pada kualitas manusia yang dilahirkan lembaga pendidikan tersebut secara nasional, implisit di dalamnya umat Islam sendiri yang mengalami *split personality (berkepribadian ganda)*. Itulah, sosok manusia Indonesia di kemudian hari, terkesan sangat baik dan ramah, namun sekaligus tidak baik dan tidak ramah.

D. Implikasi Pertarungan Ideologi

Penguatan Depag RI dalam mengatur pendidikan nasional berakibat sangat luas, sebab misi tokoh Muslim

melalui Depag berusaha memasukkan nilai agama dalam sistem pendidikan nasional. Namun, tetap saja ditemukan jalan buntu, karena kuatnya pengaruh sekulerisme dan nasionalisme dalam gerak langkah awal kemerdekaan RI yang menuai banyak pemberontakan dan kepentingan politik. Jelas bahwa kebijakan awal kemerdekaan ini berimplikasi tidak sebatas hari ini, namun berpuluh-puluh tahun kemudian.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan kita adalah "sistem ganda". Adapun sistem ganda yang telah berlangsung lebih dari 65 tahun bagi bangsa Indonesia memiliki "keunikan" tersendiri. Untuk ini disini akan dipaparkan implikasi pertarungan ideologi pada awal kemerdekaan ke dalam sistem pendidikan nasional. Setidaknya ada empat implikasi besar yang berpengaruh terhadap pembentukan kelembagaan dan manusia Indonesia yang dibutuhkan.

Pertama, implikasi kelembagaan, secara kasat mata dapat dilihat bahwa sistem yang dianut oleh pendidikan Indonesia adalah "lembaga ganda". Satu pihak lembaga pendidikan umum diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk sekolah umum. Lembaga-lembaga pendidikan umum agaknya telah difungsikan sebagai tempat mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sedangkan lembaga-lembaga pendidikan agama telah difungsikan sebagai tempat mempelajari dan mengembangkan ilmu-ilmu agama (Nangsari, 2003).

Terselenggaranya lembaga-lembaga pendidikan yang dikotomik ini menyebabkan diperlukannya upaya-upaya pengembangan dan peningkatan mutu dalam dunia pendidikan, terutama secara kelembagaan, kualitas dan arahan pendidikan Islam. Karenanya, tema kelembagaan menjadi

pembicaraan yang relevan agar terjadi proses idealisasi sebuah institusi. Seiring itu pula, maka peningkatan kualitas kelembagaan mesti mengupayakan peningkatan mutu yang sering disebut sebagai profesionalisasi. Di samping itu, arahan pendidikan Islam pun tetap kembali kepada konsep manusia secara mendasar, dalam hal ini upaya peningkatan mutu pendidikan Islam selalu berkaitan dengan masalah ideologisasi, humanisasi, liberalisasi dan globalisasi yang terus berkembang.

Kedua, implikasi tujuan pendidikan, harus diakui bahwa di awal berdirinya Negara ini berimplikasi pada tujuan pendidikan itu sendiri, yang juga bersifat "kompromis". Tujuan pendidikan dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang mengerti, memahami, dan merealisasikan nilai-nilai islami secara seimbang, masih terus diperjuangkan dan diperdebatkan. Perangkat keseimbangan tujuan-hidup ini menjadi landasan pertama dan mendasar dalam sistem pendidikan nasional yang harus dirumuskan secara filosofis.

Sebuah tujuan pendidikan dalam rumusan perundang-undangan memang sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan terkait proses belajar mengajar dan berbagai aspek pendidikan secara luas. Misalnya, mengenai tujuan, kurikulum, metode, materi dan sebagainya. Pendidikan Nasional dalam semangat nasionalisme diakui menjadi inspirasi *founding father* dalam merumuskan "Sistem Pendidikan Nasional". Namun, disayangkan bahwa "ruh kebijakan" pendidikan nasional berkiblat pada "Sistem Pendidikan Kolonial", yang akibatnya sampai sekarang ini.

Terakhir rumusan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 yang sudah mengarah kepada nilai-nilai islami, (Hidayat Juni 2003), walaupun masih perlu dipertimbangkan dan dirumuskan

kembali, sehingga sesuai dengan semangat mendasar Islam yang tidak sebatas “rumusan yang idealis”, tapi minim implementasi. Artinya, rumusan tujuan tersebut dapat diimplementasikan secara operasional dengan tindakan nyata dengan target dan tahapan secara terstruktur dan berkala.

Namun, secara menyakinkan Hidayat Nurwahid menyatakan “tak ada gading yang tak retak”, termasuk dalam merumuskan secara ideal tujuan pendidikan nasional. Walaupun diyakininya UUSPN tersebut masih ada celah dan kelemahan, namun cukup lumayan untuk memajukan pendidikan di era otonomi daerah dan globalisasi, jika pemerintah dan masyarakat berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia, maka komitmen individu dan menular menjadi komitmen kelompok serta meluas menjadi komitmen bersama secara langsung apa yang diharapkan terhadap sistem pendidikan nasional akan terwujud.

Ketiga, implikasi keilmuan, ilmu merupakan bagian terpenting dalam sejarah kehidupan manusia. Pertarungan ideologi berimplikasi pada aspek penentuan format keilmuan dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Penerapan sistem ganda telah menimbulkan perdebatan keilmuan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Secara faktual, sistem pendidikan nasional didominasi oleh nilai-nilai pendidikan Barat. Dominasi ini menyulitkan pemerintah melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam membedah dan membagi bidang dan rumpun keilmuan, walaupun sudah matang dan didiskusikan kepada masyarakat, namun masih menyisakan kekurangan.

Sudah tidak dapat disangkal dalam pandangan Islam bahwa keterpaduan ilmu sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia, dalam hal ini peradaban Islam. Untuk itu,

umat Islam harus berupaya menciptakan berbagai kreativitas dan inovasi dengan memadukan ilmu secara intergral. Integralitas-ilmu yakni sebuah upaya memadukan ilmu secara akademik "ilmu umum" dan "ilmu agama" yang masih dikotomik. Dengan harapan, proses ini dapat berlangsung di tengah rahim sejarah dan melahirkan out put berkualitas yakni *generasi yang rabbani, cerdas, dan tawaduk*. Walaupun, memang integralitas ilmu sulit diwujudkan, tapi bukan sesuatu yang mustahil.

Keempat, implikasi kurikulum pendidikan, sejak awal kemerdekaan kurikulum pendidikan nasional selalu mengalami berbagai kebijakan yang berubah-ubah. Terutama, kelompok Islam yang terus berjuang memasukkan nilai Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Secara nyata, usaha tokoh Islam memasukkan bidang keilmuan Islam yang disusun dalam kurikulum madrasah. Proses tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya PP Nomor 27, 28, 29, dan 30 Tahun 1990 dan ditindaklanjuti dengan keputusan Mendikbud Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar dan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Nomor 0489/U/1993 tentang Sekolah Umum yang menetapkan bahwa madrasah yang telah menerapkan sistem kurikulum nasional tingkat SD, SLPT dan SMU diberi status dan hak sepenuhnya sama dengan SD, SLTP, dan SMU.

Selain itu, Evaluasi Belajar Tahap Nasional (Ebtanas) dan Nilai Ebtanas Murni (NEM) madrasah di masing-masing jenjang disatukan dengan Ebtanas dan NEM SD, SLTP dan SMU. Dengan status seperti itu, kini lulusan Madrasah Aliyah melanjutkan studi mereka di berbagai universitas negeri setelah lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). (Zamakhshari, 1998:15).

Sejak dimasukkannya kurikulum MI, MTs, dan MA ke dalam SD, SLTP dan SMU maka perkembangan madrasah-madrasah semakin mengalami kemajuan yang sangat besar terutama MTs yang spektakuler sangat syarat pada proses integrasi madrasah ke dalam pendidikan nasional memang secara kultural di dukung oleh masyarakat. Dukungan tersebut, dengan adanya madrasah terpadu yang menjadi salah satu model pendidikan Islam masa kini dalam berbagai jenjang pendidikan dari MI, MTs dan MA yang pada dasarnya mengandung potensi dan kekuatan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara waktu, pada saat yang bersamaan tersedia peluang dan tantangan yang menjanjikan, selain masalah dan pengelolaan potensi secara sendiri-sendiri tidak akan tercapai hasil pendidikan yang optimal, sebaliknya, jika potensi dan kekuatan yang ada pada jenjang madrasah itu dipadukan, maka akan dapat memanfaatkan peluang dan tantangan secara maksimal.

Keempat implikasi di atas, diakui baru sedikit dari banyaknya implikasi lain akibat pertarungan ideologi awal kemerdekaan, sehingga secara kelembagaan pendidikan Indonesia terkesan sangat lamban dan rendah kualitasnya secara nasional.

E. Penutup

Diawal kemerdekaan RI telah berlangsung sebuah proses politik pendidikan yakni terjadinya pertarungan ideologi negara dalam merumuskan arah pendidikan nasional awal kemerdekaan bersumber pada “kompromi politik” dalam menetapkan dasar dan konstitusi negara. Aspek-aspek yang dipertarungkan secara ideologi terhadap negara ini lebih disebabkan situasi konflik, pemberontakan, dan kurang

kondusif situasi pada awal kemerdekaan, maka kebijakan pemerintah terhadap pendidikan bersifat kompromis seperti Piagam Jakarta, pokok-pokok pendidikan nasional dan “kompromi jalan tengah” sistem pendidikan nasional yang bermuara “sistem ganda” dalam pendidikan Indonesia. Tentu saja, kesepakatan kompromis tersebut berimplikasi pada masa depan pendidikan di Indonesia yang dinilai banyak tokoh bahwa pendidikan di Indonesia ini kesan pertamanya “kusut dan “ruwet”.

Penerapan sistem ganda ini di satu sisi memang menjadi problematika Departemen Agama RI – sekarang Kementerian Agama RI – dalam menentukan arah pendidikan yang diinginkan Islam, terutama untuk meletakkan dasar-dasar Islam dalam menentukan arah pendidikan nasional, sehingga melalui kebijakan-kebijakan Depag dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam justru malah memperkuat “sistem ganda tersebut.

Jelas sekali bahwa pertarungan ideologi telah berimplikasi pada “sistem ganda” dalam pendidikan Indonesia yang secara spesifik berdampak pada dikotomi lembaga, tujuan pendidikan yang problematik, keilmuan yang dikotomi dan penyusunan kurikulum yang problematik.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Nangsari. 2003. *Prospek Pendidikan Islam di Indonesia*. Makalah. Palembang.
- Asrohah, Hanun. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Boland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*. Jakarta: Gratifipres.

- Dhofier, Zamakhsyari. 1998. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jabali, Fuad dan Jamhari. 2002. *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Munawwir, Imam. 1986. *Posisi Islam di Tengah Pertarungan Ideologi dan Keyakinan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi (Ilmu-ilmu Sosial)*. Jilid Ke-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nata, Abudin. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nurwahid, Hidayat. 2003. *Perdebatan UUSPNN No. 20 Tahun 2003*. Juni 2003.
- Oshikawa, Noriaki. 2000. *Associate Professor pada Daito Bunka University*.
- Ridwan, Nur Khalik. 2011. *Islam Borjuis dan Islam Proletar (Konstruksi Baru Masyarakat Islam Indonesia)*. Yogyakarta: Galang Press.
- Rahim, Husni. 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Sirozi, Muhammad. 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2 Tahun 1989)*. Jakarta: INIS.
- Tim Penyusun P3B. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, KKBI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tadjab. 2004. *Ilmu Jiwa Pendidikan*. Surabaya: Karya Abitama.
- Ulum Bahrul. 2007. *Pendidikan Sekuler Mencetak Generasi Lemah*. bahrululm.blogspot.com
www.gontor.ac.id, 2011